



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 406

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

**RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.146.466.840.000
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	1.057.524.871.000
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	63.900.409.000
1.1.2	Pendapatan PPh Nonmigas	993.624.462.000
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	247.888.721.000
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	35.641.507.000
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	74.680.705.000
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	65.223.882.000
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.989.891.000
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	324.955.615.000
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	85.912.194.000
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	144.174.250.000
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	157.697.000
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	827.233.375.000
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	522.224.776.000
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	275.593.556.000
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.452.590.000
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	6.643.800.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Uraian	Jumlah
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	10.318.653.000
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.905.064.000
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	3.521.346.000
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	663.096.000
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	8.190.168.000
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	15.806.539.000
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	533.841.000
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	190.074.000
1.4	Pendapatan Cukai	224.523.740.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	215.399.690.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	141.100.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.982.950.000
1.4.4	Pendapatan Cukai Plastik	-
1.4.5	Pendapatan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	-
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	8.279.790.000
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	71.934.260.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	52.443.730.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	19.490.530.000
TOTAL		2.218.401.100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memorandum Item:	Jumlah
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	8.311.702.470
a. Komoditas Panas Bumi	2.968.099.696
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	5.343.473.153
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum	129.621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	549.137.450.331
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	235.522.497.376
4211	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000
42111	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000
421111	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000
4212	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000
42121	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000
421211	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	102.056.703.787
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	785.900.000
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	50.459.069
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	735.440.931
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	97.770.803.787
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	73.011.429.876
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	6.366.750.578
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	6.592.583.755
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	130.398.183



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	10.453.008.846
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	715.435.045
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	501.197.505
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
4214	Pendapatan Kehutanan	6.000.000.000
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	2.401.794.280
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.401.794.280
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.249.643.046
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.249.643.046
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	37.625.000
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	37.625.000
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	2.310.937.674
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	2.310.937.674
4215	Pendapatan Perikanan	3.500.000.000
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	58.423.666
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	58.359.136
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	64.530
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.733.076.334
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.733.076.334
42154	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi	1.708.500.000
421541	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut	1.708.500.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
4216	Pendapatan Panas Bumi	2.476.983.589
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.327.343.792
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.327.343.792
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	33.275.329
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	21.715.214
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	11.560.116
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	116.364.468
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	116.364.468
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	85.845.465.000
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND	85.845.465.000
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	85.169.400.000
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	46.661.644.000
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	38.507.756.000
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	676.065.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	676.065.000
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	80.430.963.536
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	74.664.104.080
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	45.754.657.241
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	24.134.895.992
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	16.198.566.431



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	547.092.504
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	220.115.594
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	3.417.372.571
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	5.737.480
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	30.311.297
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.200.565.372
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.631.073.869
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	2.164.312.523
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	4.994
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	466.756.352
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	25.842.342.909
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	1.220.146
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	126.301.272
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	57.382.958
424136	Pendapatan Investasi	288.820.112
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	4.025.803.929
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	20.235.031.752
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.107.782.740
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	436.030.060
424141	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	436.030.060



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	25.043.366
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang	23.475.648
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	9.681.205
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	12.027.089
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.305.393
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang	461.961
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang	1.567.717
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Perorangan - Uang	527.197
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	554.944
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Pemda - Uang	485.576
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	715.276.650
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	715.276.650
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	68.812.403
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	561.644.168
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	84.820.078
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	205.196.420
42441	Pendapatan dari Alokasi APBN	212.651
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	212.651
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	204.983.769
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	155.184.315



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	49.799.454
4249	Pendapatan BLU Lainnya	4.821.343.020
42491	Pendapatan BLU Lainnya	4.581.398.445
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.181.726.501
424913	Komisi, prongan, dan/atau potongan Bentuk Lain sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	1.345.164
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Yang Lalu	117.374.787
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	9.643.832
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU	174.086
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	271.134.075
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	239.533.379
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	29.658.421
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	51.541.170
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	102.033.784
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	35.804.710
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	16.339.612
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	4.138.683
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	411.197
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	16.998
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	366.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	44.498
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	147.338.524.419
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	46.340.180.719
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	36.888.680.414
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	36.822.579.440
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	61.049.783
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	100.997
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.950.193
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	258.912.174
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.062.632
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	111.757.299
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	4.910.902
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	3.427
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	135.177.914
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	532.456.862
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	438.050.425
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	15.140.561
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	76.015.458
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	435.657
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2.814.759



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	793.075.763
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	52.944.210
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	557.031.286
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	2.121.479
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	6.186.732
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	174.792.055
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	61.513.291
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	61.513.291
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	5.914.215.860
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	5.817.280.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	96.935.860
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.891.326.356
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1.652.373.136
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	232.647.562
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.305.658
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	23.908.892.042
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	7.933.937.962
425211	Pendapatan Paspor	1.348.587.143
425212	Pendapatan Visa	3.922.971.485



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit)	786.544.541
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	114.643.295
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	690.835.654
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	218.392.390
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	71.350.104
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	777.370.583
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	3.242.766
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	468.738.924
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	83.402.249
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	179.985.405
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	101.490.190
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	40.937.065
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	24.114.057
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	38.809.958
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	387.608.050
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	106.025
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.319.403
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.240.148
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	5.561.564
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	196.541



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	70.340.507
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	150.984.467
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	72.119.602
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61.739.793
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	1.717.781.641
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	136.261.885
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	565.147.570
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	558.305.849
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	3.186.217
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	367.762.904
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	48.674.088
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	304.640
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	7.219.015
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	30.919.473
42525	Pendapatan Perizinan	2.489.041.102
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	1.555.757.203
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	6.070.056



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	13.819.988
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	37.342.737
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80.979.070
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	795.072.048
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	9.055.657.151
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	535.915.272
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	728.493.258
425263	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.759.815.413
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	127.795.790
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.589.352.376
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.519.988.628
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	29.774.141
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	159.992.377
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	604.529.896
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.262.910.077
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	2.810.794
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	2.488.465
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	315.195.767
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	241.136.412



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	40.913.669
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	656.831.169
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	3.533.802
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	593.217.136
425281	Pendapatan Akreditasi	44.200.230
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	887.975
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	103.005.845
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	17.120.007
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	15.156.031
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	11.423.734
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	94.271.490
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	178.385.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	128.766.824
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	5.940.589.238
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	2.137.764.831
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	416.323.590



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.210.055.816
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	361.320.857
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	34.992.435
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	9.596.412
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	105.475.721
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	230.449.728
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	230.449.728
42533	Pendapatan Jasa Karantina	10.815.940
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	9.122.165
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1.693.775
42534	Pendapatan Jasa Agraria	2.839.317.639
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.837.020.615
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	2.297.023
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	722.241.102
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	682.936.064
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	39.305.038
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	2.700.450.557
42541	Pendapatan Pendidikan	1.928.442.188
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	30.790.932
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	1.833.373.954
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	9.012.400
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	55.264.903
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	328.163.334



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	295.878.192
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	32.285.142
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	430.108.693
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	166.598.237
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	47.787.731
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	83.078.248
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	41.933
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	127.757.638
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.712.356
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	2.132.550
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	13.736.342
425451	Pendapatan Museum	13.192.359
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	543.983
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	30.125.266.610
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	8.221.841.166
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.126.729.640
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	657.315.282
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.400.448.184
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	678.848.003
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	272.850.626
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	209.212.444
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	717.450.891



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	910.105.877
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	248.880.220
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	21.801.868.836
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	20.569.536.532
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.170.969.396
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	50.044.726
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	485.000
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	7.582.622
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	3.250.560
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	101.556.608
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	11.356.263
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	46.076.671
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	44.123.674
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.872.372.474
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.806.603
425611	Pendapatan Wisata Alam	91.417.713
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.502.948
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	17.885.942
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	60.320.714
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	46.190.076
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	14.130.639
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	1.683.245.156
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	3.153.509



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.560.902.021
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	119.189.626
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	24.296.614.840
42571	Pendapatan Bunga	1.831.792.177
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.283.594.681
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	165.379.560
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	382.817.936
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	14.310.500
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	14.310.500
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.742.193.034
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.721.083.248
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	21.109.787
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	236.680.218
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	138.989.893
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	89.187.770
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	8.502.555
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	25.366
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	17.579
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	7.786



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	69.274.136
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	241.217
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	44.218
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	32.804.535
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	36.183.548
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	617
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	18.558.444.571
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	134.352.364
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	437.881.198
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	17.653.231.714
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	332.979.295
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	818.951.468
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.385.650
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	521.000.000
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	145.000.000
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	110.000.000
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	41.565.818
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	24.943.370



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.962.966
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	213.919
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	15.766.486
4258	Pendapatan Denda	4.236.521.610
42581	Pendapatan Denda I	904.589.438
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	885.697.821
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	18.554.721
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	87.296
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	93
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	3.780
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling	18
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	245.708
42582	Pendapatan Denda II	1.064.161.507
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	1.608.255
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	15.900



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	19.550
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	209.454
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.062.308.348
42583	Pendapatan Denda III	2.267.770.666
425839	Pendapatan Denda Lainnya	2.267.770.666
4259	Pendapatan Lain-lain	7.917.636.328
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	7.440.098.773
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	67.337.251
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.935.970.633
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.458.806.807
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	194.297
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.395.788
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	24.833.173
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	1.714.408.556
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	49.609.749
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	2.186.542.520
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	314.214.682



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	314.214.682
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	7.320.308
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.318.519
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	315.635
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	580.427
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	105.727
42598	Pendapatan Lain-Lain I	131.261
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	92.944
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	38.317
42599	Pendapatan Lain-Lain II	155.871.304
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	77.643.201
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	505
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	333.894
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	281.127
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	828.937
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	76.783.642

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 193069 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999]
UNIT ORGANISASI : [999.01]

BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN UTANG

--- TETAP---



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	[999]	BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI	:	[999.02]	PENGELOLAAN HIBAH

--- TETAP---



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

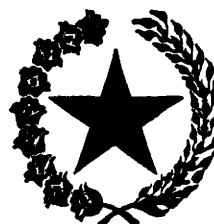
- 3 -

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999]
UNIT ORGANISASI : [999.07]**

**BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI**

--- TETAP---



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM	RM	22.988.004.408	0	0	150.270.768.176	173.258.772.584
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	RM	0	0	5.000.000.000	4.000.000.000	9.000.000.000
04	EKONOMI	RM	0	0	0	191.006.703.928	191.006.703.928
07	KESEHATAN	RM	0	0	0	2.570.660.000	2.570.660.000
10	PENDIDIKAN	RM	0	0	0	49.788.270.071	49.788.270.071
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	RM	0	0	0	8.630.040.000	8.630.040.000
	JUMLAH TOTAL		22.988.004.408	0	5.000.000.000	406.266.442.175	434.254.446.583



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999]
UNIT ORGANISASI : [999.99]

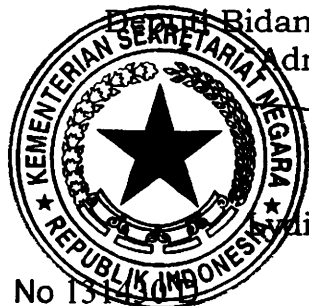
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

--- TETAP---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,**



Silvanna Djaman

SK No 131/2019



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	245.140.156.204
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	194.151.886.133
1.1.1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	98.987.006.108
1.1.2	Kementerian Agama	62.305.595.383
1.1.3	Kementerian Keuangan	3.244.680.762
1.1.4	Kementerian Pertanian	257.806.612
1.1.5	Kementerian Perindustrian	959.373.967
1.1.6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	120.143.725
1.1.7	Kementerian Perhubungan	2.404.150.134
1.1.8	Kementerian Kesehatan	2.302.739.356
1.1.9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	126.273.160
1.1.10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	192.951.492
1.1.11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.064.731.527
1.1.12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	435.492.943
1.1.13	Kementerian Pertahanan	2.888.677.643
1.1.14	Kementerian Ketenagakerjaan	1.195.928.600
1.1.15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	463.740.424
1.1.16	Kementerian Koperasi dan UKM	117.600.000
1.1.17	Kementerian Kominfo	145.822.395
1.1.18	Kementerian PUPERA	3.367.022.644



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.1.19	Kementerian Perdagangan	15.684.758
1.1.20	POLRI	500.000.000
1.1.21	Kementerian Sosial	12.023.664.500
1.1.22	Badan Intelejen Negara	500.000.000
1.1.23	Kejaksaan Agung	500.000.000
1.1.24	BRIN	32.800.000
1.2.	Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian/Lembaga	50.988.270.071
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	346.558.708.175
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.520.091
2.2	Dana Alokasi Khusus	132.135.766.740
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000
2.2.2	DAK Non Fisik	116.315.466.740
2.2.2.1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.493.556.448
2.2.2.2	Tunjangan Guru ASN Daerah	56.651.935.292
2.2.2.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.245.421.344
3.	Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan	77.000.000.000
3.1	Dana Abadi di Bidang Pendidikan	15.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	52.000.000.000
JUMLAH		668.698.864.379

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Yana Silvanna Djaman





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
A. Pembiayaan Utang	566.292.620.015
I. Surat Berharga Negara (Neto)	554.655.048.027
II. Pinjaman (Neto)	11.637.571.988
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	(636.230.414)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.258.429.586
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(3.894.660.000)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	12.273.802.402
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	97.751.162.402
i. Pinjaman Tunai	60.000.000.000
ii. Pinjaman Kegiatan	37.751.162.402
– Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	33.579.249.950
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	33.249.644.373
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	329.605.577
– Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	4.171.912.452
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(85.477.360.000)
B. Pembiayaan Investasi	(176.216.040.000)
I. Klaster Infrastruktur	(55.215.000.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Utama Karya (Persero)	(18.604.000.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.891.000.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PT Wijaya Karya Tbk (Persero)	(6.000.000.000)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
4. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(15.000.000.000)
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(13.720.000.000)
II. Klaster Pendidikan	(25.000.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(25.000.000.000)
a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	(15.000.000.000)
b. Dana Abadi Penelitian	(4.000.000.000)
c. Dana Abadi Kebudayaan	(2.000.000.000)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	(4.000.000.000)
III. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(1.212.670.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk Rehabilitasi Mangrove	(1.212.670.000)
IV. Klaster Kerja Sama Internasional	(1.907.140.000)
1. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1.531.210.000)
2. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(59.600.000)
3. Investasi kepada International Development Association (IDA)	(316.330.000)
V. Klaster Lainnya	(92.881.230.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero)	(3.556.000.000)
2. Penyertaan Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero)	(649.230.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10.000.000.000)
4. Pembiayaan Pendidikan	(52.000.000.000)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
5. Cadangan Pembiayaan Investasi	(13.676.000.000)
6. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(13.000.000.000)
C. Pemberian Pinjaman	(250.652.452)
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah (Neto)	(250.652.452)
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(4.171.912.452)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.921.260.000
D. Kewajiban Penjaminan	(823.986.000)
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(823.986.000)
1. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(681.543.000)
2. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(55.492.000)
3. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(25.444.000)
4. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(61.507.000)
E. Pembiayaan Lainnya	152.030.230.000
I. Saldo Anggaran Lebih	151.381.000.000
II. Hasil Pengelolaan Aset	649.230.000
JUMLAH	541.032.171.563

Salinan sesuai dengan aslinya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum.

Cydia Silvanna Djaman

